

Judul : Soal Burger di menu MBG, ikuti standar gizi atau ikuti tren
Tanggal : Kamis, 07 Agustus 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Soal Burger Di Menu MBG

Ikuti Standar Gizi Atau Ikuti Tren

ANGGOTA Komisi IX Netty Prasetyani Heryawan menanggapi permintaan seorang siswa agar burger masuk dalam menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Permintaan itu jadi pengingat pentingnya arah program ini. MBG tak cuma sekadar kenyang, tapi harus menjamin gizi dan keamanan pangan demi kesehatan anak-anak Indonesia.

Permintaan burger dalam menu MBG disampaikan Lutfi, siswa kelas VII SMP Negeri 25 Pontianak, Kalimantan Barat, kepada Presiden Prabowo Subianto. Netty mengingatkan agar permintaan tersebut tidak dilihat sebagai hal yang remeh atau lucu semata.

"Karena ini menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan makanan bergizi, terutama di kalangan anak-anak," ujar Netty dalam keterangannya, Selasa (5/8/2025).

Menurut Netty, MBG merupakan program strategis Pemerintah dalam membangun generasi sehat dan produktif. MBG adalah investasi jangka panjang untuk memperbaiki kualitas SDM, sehingga menu yang disajikan harus berdasarkan standar gizi seimbang, bukan mengikuti tren makanan cepat saji yang disukai anak-anak.

"Menu yang disajikan harus tinggi kandungan protein, serat dan zat gizi mikro yang dibutuhkan anak di masa pertumbuhan. Bukan makanan tinggi lemak, gula, dan garam seperti burger," jelas politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.

Netty bilang, perlu edukasi sejak dini untuk membentuk pola pikir dan kebiasaan

makan yang sehat. Anak-anak harus tahu mengapa mereka butuh sayur, buah, protein hewani dan nabati, bukan sekadar makanan enak yang viral di media sosial.

Selain pendidikan gizi, Netty juga mendorong peran aktif guru, orang tua dan media dalam mengarahkan pemahaman anak terkait makanan sehat. Mereka memiliki peran penting dalam membentuk persepsi anak. Jangan sampai makanan bergizi kalah oleh makanan bergensi.

Dia menegaskan, program MBG jangan sampai berubah makna menjadi sekadar makan gratis.

"Kita harus pastikan bahwa program ini menjadi alat transformasi kebiasaan makan anak-anak Indonesia menuju pola makan sehat dan cerdas," ucapnya.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zalni menambahkan, Pemerintah perlu memastikan keterlibatan tenaga kesehatan (nakes) daerah dalam proses pengawasan. Nakes dapat menjadi garda terdepan dalam respons cepat jika terjadi kasus keracunan atau gangguan kesehatan.

"Peran nakes sangat vital dalam mengidentifikasi penyebab masalah, memberikan pertolongan medis, dan melakukan edukasi kepada sekolah serta keluarga terkait pencegahan," kata Yahya.

Pemerintah juga diharapkan bisa mengintegrasikan audit, pengawasan, dan respons kesehatan secara holistik. Hal tersebut diperlukan agar MBG dapat terus berjalan efektif, aman dan memberi manfaat maksimal bagi anak-anak Indonesia. ■ PVB